

SEJARAH SINGKAT TERBENTUKNYA KABUPATEN TABALONG

Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong semula adalah bagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pada waktu itu berstatus sebagai Kawedanaan Tabalong. Lembaran sejarah Tabalong dimulai pada tahun 1958 ketika diputuskannya kebulatan tekad untuk menuntut kepada Pemerintah agar Kawedanaan Tabalong dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong.

Untuk maksud tersebut maka pada tanggal 15 Maret 1958 dibentuklah suatu badan sementara yaitu Panitia Sementara Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong yang susunan pengurusnya terdiri dari :

Ketua Umum	:	Baharuddin Achmid (Ass. Wedana Tanjung)
Ketua I	:	Juhri
Ketua II	:	A. Salman
Sekretaris I	:	Usnan AS.
Sekretaris II	:	Abdullah Khairul
Bendahara	:	H. Baderi
Pembantu Umum	:	As'ad
Anggota-Anggota	:	1. A. Syamsi 2. H.A. Sudani 3. M. Salman

Setelah berjalannya waktu, Panitia Sementara Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong terjadi perubahan susunan kepanitiaan dari Panitia ke II sampai dengan Panitia ke V. Sehingga terakhir terbentuk Panitia Penuntut Daerah Swatantra

Tingkat II Tabalong yang ke VI dengan susunan sebagai berikut :

Pelindung/Koordinator : Tjatur Tunggal Kawedanaan

Tabalong, Yaitu :

1. Wedana Tabalong
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung
3. Kepala Angkatan Kepolisian
4. Dan BUTERPRA

PANITIA INTI

Ketua	: DJuhri
Ketua I	: M. Salman
Ketua II	: Maslan
Ketua II	: S. Anwar
Sekretaris Umum	: Usnan AS
Sekretaris I	: Abdulllah
Sekretaris II	: M. S. Arifin
Bendahara	: Norbek

SEKSI-SEKSI

Seksi I	:
Politik	Ketua : H. Baijuri Wakil Ketua : Madjedi Efendi Dibantu Oleh : 7 Orang Anggota
Seksi II	:
Keuangan	Ketua : H. Basri Wakil Ketua : H. Basuni Dibantu Oleh : 17 Anggota

Seksi III :
Perencanaan / Ketua : Abdul Racham
Bangunan dan Wakil Ketua : H. Baderi
Perumahan Dibantu Oleh : 12 Orang Anggota

Seksi IV :
Organisasi Ketua : Machmud Asjnawie
Wakil Ketua : Soetarto
Dibantu Oleh : 50 Orang Anggota

Seksi V :
Pelaksanaan Ketua : A. Sadjeli
Pekerjaan Umum Wakil Ketua : S. Alwie Almusjawa
Dibantu Oleh : 13 Orang Anggota

Seksi IV :
Ketua : A. Sjamsi
Wakil Ketua : J. Sompie
Dibantu Oleh : 11 Orang Anggota

Pembantu-Pembantu : - Semua Camat dalam Kawedanan
Tabalong
- Semua Anggota DPRD Kabupaten
Hulu Sungai Utara yang berdomisili
di Kawedanaan Tabalong

Panitia ini telah berusaha dengan sekuat tenaga dengan dana yang ada, mengadakan hubungan dengan pihak pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan DPRD-GR

nya serta tokoh - tokoh politik dan ormas yang diwakili dalam DPRD-GR Propinsi Kalimantan Selatan, agar dapat dukungan dari mereka atas tuntutan ini.

Dengan adanya kegiatan tersebut serta kerjasama yang harmonis, maka dalam sidang istimewa DPRD-GR Kalimantan Selatan telah menyetujui tuntutan rakyat Tabalong, Tapin dan Tanah Laut masing-masing dijadikan Daerah Swatantra Tingkat II.

DPRD-GR Propinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi yang diajukan ke pemerintah pusat, memohon pemerintah pusat dapat menyetujui dan selanjutnya melahirkan Daerah tingkat II.

Panitia dalam usahanya memperjuangkan ke tingkat pusat telah menghubungi Gubernur Kalimantan Selatan (waktu itu) Bapak HAJI MAKSID, untuk memohon nasehat dan petunjuk serta do'a restu untuk berangkat ke Jakarta. Oleh Bapak Gubernur diberikan petunjuk-petunjuk dan sekaligus merestui keberangkatan panitia menemui Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pejabat-Pejabat Tinggi lainnya guna menyampaikan hasrat rakyat Tabalong dimaksud.

Berangkatlah Saudara Juhri dan Usnan AS. Masing-masing selaku Ketua Umum dan Penulis I dan dibantu pula oleh Bapak Mucyar Usman selaku wakil dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

Dalam waktu yang relatif singkat, rombongan panitia telah dapat diterima oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Bapak IPIK GANDAMANA dan percakapan akhir beliau mengatakan, bahwa pada prinsipnya saya dapat menyetujui

tuntutan ini dan akan dimajukan pada sidang DPR-GR yang akan datang.

Sebagai realisasi dari kunjungan panitia, oleh DPR-GR telah mengutus Ketua Komisi B, yaitu Bapak I.S. HANDOKOWIJOYO untuk menuju ketiga calon Dae.³ Tingkat II dimaksud. Dalam kunjungan ke Tabalong Bapak I.S. HANDOKOWIJOYO mengatakan “tidak ada alasan untuk tidak menyetujui tuntutan rakyat Tabalong ini”.

Perjuangan kita telah meningkat lebih jauh, dimana pada tanggal 5 September 1964 Kawedanaan Tabalong telah ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Persiapan Tingkat II Tabalong dengan Kepala Kantornya Bapak USMAN DUNRUNG mantan Wedana Barabai.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, sejak tanggal 14 Juni 1965, Daerah Persiapan Tingkat II Tabalong ini ditingkatkan lagi menjadi Daerah Otonom Tingkat II Tabalong, yang menjalankan roda pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun legeslatif dan untuk ini juga pemerintahan tetap dipercayakan kepada Bapak USMAN DUNRUNG.

Pada tanggal 1 Desember 1965 pukul 11.00 pagi bertempat di Lapangan “GIAT” Tanjung oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Bapak DR. SOEMARNO SOSROATMODJO dengan disaksikan puluhan ribu rakyat Tabalong dan pejabat-pejabat tinggi Kalimantan Selatan lainnya, maka papan nama yang diselubungi kain beludru hijau dengan untaian sutera kuning keemasan, telah dibuka dengan resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan dibalik selubung yang terbuka itu terpampang kalimat yang bersejarah yang berbunyi “DAERAH TINGKAT II TABALONG DIRESMIKAN 1 DESEMBER 1965”.

Demikianlah sejarah singkat terbentuknya panitia penuntutan dan proses peresmian berdirinya Daerah Tingkat II Tabalong. Selesai.